



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MURSALIN NADJIB
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 150802

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	950.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m2/75 m2 di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	356.000.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000		
3. MOBIL, DAIHATSU TERIOS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 168.000.000		
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	10.700.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	112.894.135
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.429.594.135
III. HUTANG	Rp.	192.166.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.237.428.135

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **3 Juli 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.